



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **224** /35.73.112/2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023.**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
 - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - e. pengukuran kinerja;

- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **30 Agustus** 2019

WALIKOTA MALANG,


SUTAJI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 188.45/ ~~237~~ /35.73.112/2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana : X(1) = Indeks Harapan Hidup X(2) = Indeks Pendidikan X(3) = Indeks Standar hidup layak		
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indek Pendidikan	Indeks Pendidikan = (Jumlah Rata-rata Harapan Lama Sekolah ditambah Jumlah Rata-rata Lama Sekolah) dibagi dua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup Maksimal dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal dibagi Angka Harapan Hidup Maksimal	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$ P_{ij} = harga komoditas i dikota j P_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan m = jumlah komoditas	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	

Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB(n) - PDRB(n-1)}{PDRB(n-1)} \times 100\%$ <p>$PDRB(n)$ = nilai PDRB tahun n $PDRB(n-1)$ = nilai PDRB tahun $n-1$</p>				
	Gini Rasio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana : P_i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p>				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	$\frac{PEkraf(n) - PEkraf(n-1)}{PEkraf(n-1)} \times 100\%$			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	No	Indikator	Parameter	Bobot	Dinas Lingkungan Hidup
		1.	Indeks Kualitas Udara	SO ₂	30%	
				NO ₂		
		2.	Indeks Kualitas Air	TSS	30%	
				DO		
				BOD		
				COD		
				Total Fosfat		
Fecal - Coli						
Total - Coliform						

		3. Indeks Tutupan Hutan *)	Luas Hutan	40%		
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan					
	Indeks Modal Sosial					
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS				Dinas Sosial P3AP2KB	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)				Kecamatan	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				Dinas Sosial P3AP2KB	
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB				
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	<p>Jumlah Perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen</p> <p>Jumlah pelanggaran terhadap Perda yang mengandung sanksi yang ditindak dibagi dengan jumlah pelanggaran terhadap</p>			Satpol PP	

		Perda yang mengandung sanksi dikali seratus persen		
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah	
	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD	
	Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat	
	Rasio PAD	PAD dibagi dengan jumlah pendapatan daerah	Bapenda	
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan: IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	

WALIKOTA MALANG,


SUNAJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 188.45/231 /35.73.112/2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Instusionalisasi Pendidikan Karakter yang berkeadilan dan berbudaya	Indeks Pendidikan	Jumlah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dibagi dua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPS
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan dalam Mendukung Pendidikan yang Berkarakter dan Berbudaya	Harapan Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}$ Keterangan : <i>RLS</i> : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah <i>Lama sekolah penduduk</i> : lama sekolah penduduk ke- <i>i</i> di suatu wilayah <i>n</i> : jumlah penduduk (<i>i</i> =1,2,3,..., <i>n</i>)	Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal; Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; Bidang Pembinaan Ketenagaan	BPS
	Rata-rata lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan :	Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;	BPS

		HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; Bidang Pembinaan Ketenagaan	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dari tujuh dimensi	Bidang Kebudayaan	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

2. DINAS KESEHATAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup Maksimal dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal dibagi Angka Harapan Hidup Maksimal	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik (BPS)
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Persentase RS yang terakreditasi	Jumlah RS yang terakreditasi dibagi jumlah RS dikali 100%	Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Tahunan RS ; SIRS Online (RS Online)
	Persentase puskesmas yang terakreditasi	Jumlah puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah puskesmas dikali 100%	Bidang Pelayanan Kesehatan ; Bidang Sumber Daya Manusia,	Laporan Validasi Data Puskesmas Kota Malang

			Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok individu di suatu wilayah	Bidang Kesehatan Masyarakat ; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Badan Pusat Statistik (BPS)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

3. DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan budaya baca dan tertib tata kelola kearsipan	Persentase masyarakat sadar membaca	Jumlah masyarakat sadar membaca dibagi jumlah penduduk kota malang x 100%	Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah	
	Persentase tata kelola kearsipan berbasis elektronik	Jumlah tata kelola kearsipan berbasis elektronik dibagi jumlah seluruh arsip x 100%		
Meningkatnya Layanan Budaya baca	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 x 100%	Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan; Bidang Preservasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Data Pengunjung
	Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan tahun n dikurangi jumlah koleksi perpustakaan tahun n-1 dibagi		Data koleksi perpustakaan

		jumlah koleksi perpustakaan tahun n-1 x 100%		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan dokumen arsip yang berbasis elektronik	Jumlah dokumen arsip yang ter-telusur tahun n dikurangi jumlah dokumen arsip yang ter-telusur tahun n-1 dibagi jumlah dokumen arsip yang ter-telusur tahun n-1 x 100%	Bidang Pengelolaan Arsip	Data Arsip
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

4. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif		Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/purchasing power parity			
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi Sehat	Jumlah koperasi Sehat dibagi jumlah seluruh koperasi Aktif x 100 %	Bidang Koperasi	Data koperasi (On-Line Data System Kemenkop RI)
	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	Jumlah Pertumbuhan usaha mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil dibagi jumlah seluruh usaha mikro dikali 100%	Bidang Usaha Mikro	Data Usaha Mikro binaan Dinkop dan UM Kota Malang

Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	Jumlah pasar yang ditetapkan menjadi pasar halal dibagi jumlah pasar yang dikelola pemkot dikali 100%	Bidang Perdagangan	Data Pasar Halal
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	Simpang standar dibagi harga rata-rata dikali 100%	Bidang Perdagangan	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	Laju pertumbuhan industri tahun berjalan	Bidang Industri	Data Pertumbuhan Industri
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

5. DINAS SOSIAL PERMBERDAYAAN PERPEMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) penurunan PMKS		Dinas Sosial P3AP2KB	
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan	IPG			
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$ Keterangan $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun ke } t$		

		<p>P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)</p> <p>B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 – t</p> <p>D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 – t</p> <p>M_o = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 – t</p> <p>M_i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 – t</p>		
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina dibagi jumlah PMKS dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Data PMKS
	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri dibagi jumlah PMKS binaan dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Data PMKS
Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	Ratio KDRT	Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 1000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Data Laporan KDRT
	IDG	Indeks keterwakilan perempuan diparlemen ditambah indeks pengambilan keputusan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Data Hasil Pemilu

		ditambah indek pendapatan perkapita perempuan dibagi 3		
Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kependudukan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

6. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	\sum index ketahanan pangan kota x nilai standarisasi masing masing indicator pada kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Bidang Ketahanan Pangan	
	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	Konsumsi Energi Pangan Lokal (umbi-umbian, jagung, makanan berpati dan olahannya) dibagi Konsumsi Energi Beras	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Bidang Perikanan	
	Persentase peningkatan produksi sektor pertanian	Produksi sektor pertanian (tahun n) dikurangi produksi sektor pertanian (tahun n-1) dibagi produksi sektor pertanian (tahun n-1) dikali 100%	Bidang Pertanian	

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

7. DINAS PERHUBUNGAN

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas, Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	IKLI Perhubungan	Nilai IKLI	Dinas Perhubungan	Hasil Survey
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase pelayanan angkutan jalan	Jaringan jalan yang terlayani angkutan umum dibandingkan dengan total jaringan jalan	Bidang Angkutan	Data angkutan jalan
	Angka kemacetan	Jumlah lokasi kemacetan dibandingkan dengan ruas jalan di kota Malang	Bidang Lalulintas	Data titik kemacetan
Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan PAD retribusi parkir	Jumlah retribusi parkir tahun n dikurangi jumlah retribusi parkir tahun n-1 dibagi jumlah retribusi parkir tahun n-1 x 100%	Bidang Pengelolaan Perparkiran	Data Realisasi PAD
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Kematangan SPBE	Nilai Indeks Kematangan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penilaian KemenpanRB
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks Tata Kelola SPBE	Bidang Aplikasi Informatika	Penilaian KemenpanRB
	Indeks Layanan SPBE	Nilai Indeks Layanan SPBE	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Penilaian KemenpanRB
	Persentase ketermanfaatan data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dimanfaatkan dibagi jumlah seluruh data statistik sektoral dikali 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Data Statistik Sektoral
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan persandian dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Data Persandian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

9. DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPS
	Predikat WBK	Penetapan WBK		Penetapan Kemenpan RB
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah pekerja/buruh di perusahaan swasta/PMA/PMDN dibagi Jumlah perusahaan swasta/PMA/PMDN	Bidang Tenaga Kerja	BPS
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun (n-1) dikali 100%	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Data dan Sistem Informasi
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk yang bekerja dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%	Bidang Tenaga Kerja	BPS
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	Nilai Indeks SPBE	Bidang Data dan Sistem Informasi	Hasil Evaluasi SPBE Kemenpan
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Nilai SKM	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum dan Sosial;	Hasil Survey

			Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan sosial budaya	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional dan akuntabel	Predikat WBK/WBBM	Penetapan WBK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penetapan Kemenpan RB
Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persentase penduduk ber KTP	Jumlah penduduk yang ber KTP dibagi jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Database Kependudukan
	persentase penduduk berakta kelahiran usia 0 sd 18 tahun	Jumlah penduduk berakte kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
	persentase pasangan berakta nikah	Jumlah pasangan berakte nikah dibagi pasangan menikah	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Database Kependudukan
	persentase penerbitan akta kematian	Jumlah penerbitan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal ditahun berkenaan dikali 100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Database Kependudukan

Meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi	persentase integrasi data penduduk terhadap pelayanan publik	Jumlah aplikasi pelayanan masyarakat yang telah terintegrasi dengan aplikasi kependudukan dibagi jumlah aplikasi pelayanan masyarakat kali 100 %	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Database Kependudukan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

11. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISITA

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pemuda dan Pariwisata Kota Malang yang berkarakter dan berdaya saing	Persentase PDRB Sektor Pariwisata		Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
	Peringkat Kota Layak Pemuda			
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan olahraga yang intensif, berjenjang dan berkelanjutan	Peringkat Kota Malang pada <i>event</i> olahraga tingkat provinsi	Peringkat Kota Malang	Bidang Pemberdayaan Olahraga	
	Jumlah Penyelenggaraan <i>Event</i> Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)			
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan kepemudaan yang produktif dan inovatif	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tahun ini dibagi Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan tahun lalu	Bidang Kepemudaan	

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif tahun n dikurangi pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 dibagi pelaku ekonomi kreatif tahun n-1	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata tahun ke n	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Nilai Evaluasi SAKIP

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3				4	5
Meningkatkan Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	No	Indikator	Parameter	Bobot	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	Hasil Uji Kualitas Lingkungan Hidup
		1.	Indeks Kualitas Udara	SO ₂	30%		
				NO ₂			
		2.	Indeks Kualitas Air	TSS	30%		
	DO						
	BOD						
	COD						
	Total Fosfat						
	Fecal - Coli						
	Total - Coliform						
3.	Indeks Tutupan Hutan *)	Luas Hutan	40%				

		*) Dari Kementrian LHK tahun 2016 menjadi Indeks Tutupan Vegetasi, Tahun 2017 menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{((Ci/Lij)^2 \text{ Rata-rata} + (Ci/Lij)^2 \text{ Maksimum})/2}$	Bidang Tata Lingkungan Hidup; Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; UPT Laboratorium Lingkungan	Hasil Uji Pemantauan Kualitas Air
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kota Malang	Persentase Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah dibagi jumlah Timbulan Sampah dikali 100 %</i> Keterangan : 1. <i>Persentase Pengurangan Sampah = Jumlah sampah yang berkurang oleh masyarakat dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100 %</i> 2. <i>Persentase Penanganan Sampah = Jumlah Sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota/DLH</i>	Bidang Persampahan dan Limbah B3; UPT Pengelolaan Sampah	Data Sampah yang masuk ke TPA dan Sampah yang diolah ke PKD
Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan dan kuantitas RTH publik yang dikelola	Persentase Luas RTH Publik yang tersedia	Luasan RTH Publik yang tersedia dibagi Total Luasan RTH Publik dikali 100%	Bidang Ruang Terbuka Hijau	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

13. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Survey IKLI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Nilai Survey IKLI Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Bina Marga; Bidang Cipta Karya; Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Survey
	Persentase Area Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Rekapitulasi Penanganan Kawasan Kumuh
	Persentase Penurunan titik genangan	Jumlah titik genangan tahun n-1 dikurangi jumlah titik genangan tahun n dibagi jumlah titik genangan tahun n-1 dikali 100%	Bidang Bina Marga	Data titik genangan
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dan Penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang	Jumlah luas lahan yang sudah memiliki keterangan rencana kota dibagi luas Kota Malang	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data KRK
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

14. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan kondusivitas Lingkungan sosial	Persentase penurunan kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial	Jumlah kejadian dan konflik yang terselesaikan dibagi jumlah konflik dikali seratus persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial
Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	Jumlah kejadian yang terselesaikan dibagi seluruh kejadian dikali seratus persen	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Data kejadian gangguan disintegrasi yang terjadi di Kota Malang dalamsatutahun Data kejadian gangguan disintegrasi yang terselesaikan
	Persentase partisipasi politik masyarakat dan peran serta Ormas dalam pembangunan	Jumlah calon pemilih dibagi jumlah penduduk ber-EKTP setiap tahun dikali seratus persen	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Data penduduk ber EKTP setiap tahun Data calon pemilih setiap tahun
		Jumlah LSM/Ormas yang terdaftar dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibagi jumlah LSM/Ormas yang terdata dikali seratus persen		Data pemilih dalam pilpres dan pileg 2019 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Malang tahun 2019
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

15. BADAN PENDAPATAN DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan melalui Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Data Realisasi PAD
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100 %	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD; Bidang Pajak Daerah; dan Bidang Pengendalian Pajak Daerah	Data Realisasi PAD
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

16. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang akuntabel, sinergis dan partisipatif	Nilai evaluasi SAKIP komponen Perencanaan.	Nilai komponen perencanaan pada hasil SAKIP Kemenpan RB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan Hasil Evaluasi SAKIP Kota Malang oleh Kemenpan-RB

Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD dan RPJMD) yang sesuai ketentuan dibagi jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dikali 100%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Perencanaan Perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) yang sesuai ketentuan dibagi jumlah Perencanaan Perangkat Daerah dikali 100%	Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase Jumlah kajian / analisa / studi / rencana induk / grand design yang mendukung perencanaan.	Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design yang mendukung perencanaan pada tahun N dibagi jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design pada tahun N dikali 100%	Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikali 100%	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda; Hasil verifikasi Renja PD Mitra
	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan kali 100%	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kertas Kerja Evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja Bappeda; Hasil verifikasi Renja PD Mitra

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

17. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Jumlah L/K SKPD Yang Berkualitas dibagi Jumlah Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Malang x 100%	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah; Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

18. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Meningkatnya kinerja ASN	Rata-rata capaian nilai kinerja ASN Kota Malang	Jumlah nilai SKP ASN Pemkot Malang dibagi ASN Kota Malang dikali 100 %	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Jumlah ASN sesuai yg ditempatkan sesuai kompetensi dibagi Jumlah ASN Pemkot dikali 100%	Bidang Mutasi; Bidang Pengembangan Kompetensi dan Fasilitasi Profesi	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

19. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	Jumlah indikator yang telah tercapai dibagi jumlah indikator kota tangguh bencana dikali seratus persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Kelurahan Data SLTA; Data Hotel dan Perusahaan Data Instansi Data Perguruan Tinggi

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	Jumlah korban yang tertangani sesuai <i>respond time</i> dibagi jumlah seluruh korban dikali seratus persen	Bidang Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Data Korban Bencana
	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah masyarakat Sadar Bencana dibagi jumlah masyarakat Usia Produktif dikali seratus persen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Data Penduduk; Data Masyarakat Sadar Bencana
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah penanganan kejadian pascabencana dibagi jumlah seluruh kejadian pascabencana yang seharusnya ditangani dikali seratus persen	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Data rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pengaduan masyarakat tahun n-1 dikurangi jumlah pengaduan masyarakat tahun n dibagi jumlah pengaduan masyarakat tahun n-1 dikali 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali 100%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Bidang Penegakan Peraturan	Data Pelanggaran K3

			Perundang-Undangan Daerah; Bidang Perlindungan Masyarakat	
Meningkatnya stabilitas lingkungan	Rasio linmas per RT	Jumlah satuan Linmas dibagi jumlah RT	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data Linmas
	Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran	Jumlah tanggap kasus kebakaran dengan response time rate dibagi jumlah kasus total kebakaran dikali 100%	UPT Pemadam Kebakaran	Data Kejadian Kebakaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

21. INSPEKTORAT

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien	Level Maturitas SPIP Kota Malang	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan pada Indeks RB	Hasil evaluasi RB oleh Menpan pada komponen penguatan pengawasan	Inspektorat	
	Persentase temuan Inspektorat ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti dibanding jumlah seluruh rekomendasi x 100%	Inspektorat	

	Persentase Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3	Jumlah Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3 dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100%	Inspektorat	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	Inspektorat	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi temuan BPK yang ditindaklanjuti dibanding jumlah seluruh rekomendasi x 100%		

22. SEKRETARIAT DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah di komponen laporan kinerja	Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai SAKIP Kota Malang	Sekretariat Daerah	LHE KEMENPANRB
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah x 100%	Bagian Hukum	Register Produk Hukum
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Hasil Survey

Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	Jumlah standar kompetensi yang telah diterapkan dibagi jumlah standar kompetensi yang telah ditetapkan x 100%	Bagian Organisasi	Data Penetapan Standar Kompetensi
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Bagian Organisasi	LHE KEMENPANRB
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	Jumlah IKK yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh IKK x 100%	Bagian Pemerintahan	LPPD
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	Jumlah perangkat daerah yang nilai SKMnya berpredikat baik ($\geq 76,61$) dibagi jumlah seluruh perangkat daerah x 100%	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA; Bagian Pengadaan Barang/Jasa; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SKM Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Bagian Umum	Nilai Evaluasi SAKIP

23. SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	Sekretariat DPRD	Hasil Survey

Meningkatnya Fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase Promperda yang menjadi Perda	Jumlah Promperda yang menjadi Perda dibagi seluruh promperda dikali 100%	Bagian Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Buku Dokumen Promperda
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkatan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Bagian Program dan Keuangan; Bagian Umum; Bagian Humas	LHE Inspektorat

24. KECAMATAN BLIMBING

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Blimbing	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat

25. KECAMATAN KEDUNGKANDANG

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kedungkandang	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat

26. KECAMATAN KLOJEN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Klojen	

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat

27. KECAMATAN LOWOKWARU

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Lowokwaru	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat

28. KECAMATAN SUKUN

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sukun	Hasil survei
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat

WALIKOTA MALANG,

SUTAJI